

CIVIL SOCIETY; *Upaya Menciptakan Masyarakat Madani**

(CIVIL SOCIETY; EFFORTS TO CREATE CIVIL SOCIETY)

Nur Rohim Yunus

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: nurrohimyunus@gmail.com

Abstract: Civil society is a significant element in building democracy. One essential condition for democracy is the creation of public participation in decision-making processes carried out by the state or government. Civil society requires civic engagement, namely the involvement of citizens in social associations. Civic engagement allows the growth of openness, trust and tolerance among one another.

Keywords: Civil Society, Civil Society, Civil Society

Abstrak: Masyarakat madani merupakan elemen signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya *civic engagement* yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya.

Kata Kunci: Civil Society, Masyarakat Madani, Masyarakat Sipil

* Diterima tanggal naskah diterima: 24 Juli 2013, direvisi: 23 September 2013, disetujui untuk terbit: 5 November 2013.

Pendahuluan

Pemaknaan *civil society* sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahannya dalam pembentukan *civil society* dalam masyarakat muslim modern. *Masyarakat Madani* merupakan sebuah konsep yang sama dengan konsep "*civil society*". Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholis Madjid.¹

Jean L. Cohen dan Andrew Arato mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial mencakup semua kelompok sosial paling dekat (khususnya rumah tangga), perkumpulan (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan wadah-wadah komunikasi publik yang diciptakan melalui bentuk pengaturan dan mobilisasi dari secara independen, baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan.²

Antara Masyarakat Madani dan *Civil Society* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi "*Islami*". Menilik dari substansi *civil society* lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah yang dijadikan pembernan atas pembentukan *civil society* di masyarakat Muslim modern akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya.

Perbedaan lain antara *civil society* dan masyarakat madani adalah *civil society* merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga *civil society* mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam bauian dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan

¹ Ahmad Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2012), h.215

² Lihat: Jean L. Cohen dan Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, (Massachusetts: MIT Press, 1992), h. ix-x. Dilihat juga: Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 18

toleran atas landasan nilai-nilai etik moral transcendental yang bersumber dari wahyu Allah.³

Pengertian Masyarakat Madani

Dewan Rahardjo mengemukakan definisi masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya masyarakat madani adalah warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara. Ia juga mengemukakan dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi nasional yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Berbeda halnya dengan Azyumardi Azra, ia menyatakan bahwa masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan prodemokrasi yang mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan ber-tamaddun (*Civility*). Sedang cendikiawan muslim Indonesia Nurcholish Madjid istilah masyarakat madani mengandung makna toleransi kesediaan pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial.⁴

Sedang pengertian sinonimnya, yaitu masyarakat sipil menurut Andre Groz masyarakat sipil sebagai jaringan hubungan sosial yang dibangun orang per-orang diantara mereka sendiri dalam konteks kelompok atau komunitas. Eksistensi masyarakat sipil tidak bergantung pada perantaraan otoritas lembaga negara. Semua hubungan di dalam kategori itu lebih banyak dibangun atas dasar timbal-balik dan kesukarelaan daripada atas dasar hukum atau kewajiban yuridis. Berlawanan dengan masyarakat sipil yang hakikatnya berdasarkan *peraturan masyarakat sendiri* oleh pribadi-pribadi yang membentuk masyarakat ini, negara pada hakikatnya berdasarkan “peraturan dari luar” yang menggunakan kekerasan dan paksaan.⁵ Sementara Ernest

³ Masykuri Abdillah, Endang Rudiatin, *Dari Civil Society Ke Civil Religion*, (Jakarta: MUI, 2007) h. 32

⁴ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999) h.53

⁵ Dikutip dari George J. Aditjondro, “Implikasi Pergeseran Ilmuwan Sosial dari ‘Pro-Negara’ ke ‘Pro-Masyarakat’, dalam Nico Schulte Nordholt dan Leontine Visser (eds.), *Ilmu-ilmu Sosial di Asia Tenggara: dari Partikularisme ke Universalisme* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1997), h. 45. Dilihat juga: Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 19

Gellner mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang cukup kuat mengimbangi negara. Meskipun tidak menghalangi negara dari memenuhi peranannya sebagai penjaga perdamaian dan sebagai wasit di antara berbagai kepentingan, masyarakat sipil tetap dapat menghalangi negara yang hendak mendominasi dan mengatomisasi masyarakat.⁶

Unsur Pokok Masyarakat Madani⁷

Munculnya masyarakat madani disebabkan unsur-unsur sosial dalam tatanan masyarakat. Unsur tersebut merupakan kesatuan yang saling mengikat dan menjadikan karakter khas masyarakat madani. Unsur pokok yang harus dimiliki masyarakat madani yaitu: wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial.

1. Wilayah Publik Yang Bebas

Merupakan sarana mengemukakan pendapat warga negara yang mana didalamnya semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan *civil society*.

2. Demokrasi

Demokrasi adalah persyaratan mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak akan terwujud yang mana demokrasi adalah suatu tatanan politik sosial yang besumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara.

3. Toleransi

Merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Menurut Nurcholish Madjid toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. jika toleransi menghasilkan tata cara pergaulan yang menyenangkan antara

⁶ Lihat, Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, terjemahan Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1995), hal. 6. Dilihat juga: Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 19

⁷ Ahmad Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2012) h. 225

kelompok yang berbeda-beda maka hasil itu dipahami sebagai hikmah dan manfaat dari ajaran yang benar. Toleransi bukan hanya tuntutan sosial masyarakat majemuk saja, tapi juga menjadi bagian terpenting pelaksanaan ajaran moral.

4. Kemajemukan

Disebut juga pluralism yang tidak hanya dipahami sebagai sebatas sikap yang harus mengakui dan memahami kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap tulus untuk menerima kenyataan pandangan sebagai suatu yang alamiah dan rahmat tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

5. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban warga negara yang mencakup segala aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan pelengkapan. Dengan pengertian lain keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemuatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.

Masyarakat Madani di Indonesia

Indonesia memiliki tradisi kuat civil society, jauh sebelum bangsa Indonesia berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam merebut kemerdekaan. Selain berperan sebagai organisasi pejuang penegak HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Organisasi berbasis Islam seperti syarikat Islam (SI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen civil society yang penting dalam perkembangan masyarakat sipil Indonesia. Terdapat strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani yang bisa terwujud di Indonesia.

1. *Pandangan Reformasi Sistem Politik Demokrasi* merupakan pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada kepentingan ekonomi. Pembangunan institusi demokratis lebih diutamakan oleh warga negara dibanding pembangunan ekonomi.

2. *Pandangan integrasi nasional dan politik.* Menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat sebelum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi pengikut pandangan ini praktik demokrasi ala barat hanya akan berakibat koflik antara sesama warga bangsa.
3. *Paradigma pembangunan masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi.* Ini merupakan alternatif diantara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pembangunan demokrasi. Pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khusus kalangan kelas menengah. Hal itu mengingatkan demokrasi membutuhkan topangan kultural selain mendukung struktural.

Pengembangan demokrasi masyarakat madani atas dasar tiga paradigma diatas selayaknya tidak hanya tergantung pada salah satu pandangan tersebut. Sebaliknya untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma. Tiga paradigma diatas dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi sekarang melalui:

1. Mereformasikan sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi.
2. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri secara politik dan ekonomi.
3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negara secara keseluruhan.

Masyarakat madani Indonesia masih merupakan sistem-sistem yang dihasilkan oleh sistem politik represif. Ciri kritisnya lebih menonjol dibandingkan ciri struktifnya. Lebih banyak menuntut daripada memberi sumbangan terhadap pemecahan masalah.

Mahasiswa merupakan salah satu komponen strategis bangsa Indonesia dalam pembangunan demokrasi dan masyarakat madani. Peran strategis mahasiswa dalam proses perjuangan demokrasi menumbangkan rezim otoriter seharusnya ditindak lanjuti dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi bangsa dan pembangunan masyarakat demokrasi

madani Indonesia. Karena mahasiswa merupakan bagian dari kelas menengah, ia memiliki tanggung jawab terhadap nasib masa depan demokrasi dan masyarakat madani Indonesia.

Sikap demokratis diekspresikan melalui peran aktif mahasiswa dalam proses pendemokrasi masyarakat melalui cara analogis, santun, dan bermartabat. Adapun sikap kritis mahasiswa dapat dilakukan dengan mengamati, mengkritik, mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah atau lembaga public terkait, khususnya pada kebijakan yang menyangkut dengan masa depan bangsa.

Penutup

Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya *civic engagement* yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya. Masyarakat madani dan demokrasi merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Proses demokratisasi menuju masyarakat madani merupakan faktor pendorong bagi negara untuk selalu mengusahakan perbaikan terus menerus dan menjaga agar tidak terjadi kemerosotan demi kesejahteraan rakyat.

Pustaka Acuan:

- Abdillah, Masykuri, Endang Rudiatin, *Dari Civil Society Ke Civil Religion*, Jakarta: MUI, 2007.
- Aditjondro, George J., "Implikasi Pergeseran Ilmuwan Sosial dari 'Pro-Negara' ke 'Pro-Masyarakat', dalam Nico Schulte Nordholt dan Leontine Visser (eds.), *Ilmu-ilmu Sosial di Asia Tenggara: dari Partikularisme ke Universalisme* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1997).
- Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

- Cohen, Jean L., dan Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, Massachussets: MIT Press, 1992.
- Culla, Adi Suryadi, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Gellner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, terjemahan Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995.
- Ubaedillah, Ahmad, dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2012.